

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERDA NO. 2 TAHUN 2023 TENTANG
PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK DI SMP NEGERI 2
TAMAN KABUPATEN SIDOARJO JAWA TIMUR**

Hani Alviana Putri

Program Studi Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
hanialvianaputri12@gmail.com

Indah Murti

Program Studi Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
endah@untag-sby.ac.id

Adi Soesiantoro

Program Studi Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
adisusiantoro@untag-sby.ac.id

ABSTRACT

Education is a fundamental right that must be fulfilled for all children, including students with disabilities. As part of the implementation of Sidoarjo Regency Regional Regulation Number 2 of 2023 concerning Child-Friendly Regency Administration, the local government promotes inclusive education to ensure equal access to education without discrimination. This study aims to analyze the implementation of inclusive education in fulfilling the educational rights of students with disabilities at SMP Negeri 2 Taman, Sidoarjo Regency, and to identify the supporting and inhibiting factors. This research employed a descriptive qualitative approach using George C. Edward III's policy implementation theory, which includes communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. Data were collected through interviews, observations, and documentation involving informants from the Sidoarjo Regency Education and Culture Office, the Disability Service Unit, school administrators, Special Assistant Teachers (GPK), parents, and students with disabilities. The findings indicate that the implementation of inclusive education has been carried out relatively well through effective communication and coordination, adequate resources, strong school commitment, and clear Standard Operating Procedures (SOPs) and division of responsibilities. Supporting factors include support from local government, the Disability Service Unit, the availability of GPKs, and collaboration among stakeholders. However, challenges remain, including limited facilities and infrastructure, an insufficient number of GPKs, diverse educational needs of students with disabilities, and incidents of bullying.

Keywords: *Policy Implementation, Inclusive Education, Educational Rights,*

Students with Disabilities, Child-Friendly Regency.

ABSTRAK

Pendidikan merupakan hak dasar setiap anak, termasuk peserta didik penyandang disabilitas. Sebagai implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak, pemerintah daerah mendorong penyelenggaraan sekolah inklusif untuk menjamin pemenuhan hak pendidikan tanpa diskriminasi. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi sekolah inklusif dalam pemenuhan hak pendidikan siswa disabilitas di SMP Negeri 2 Taman Kabupaten Sidoarjo serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambatnya. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teori implementasi kebijakan George C. Edward III yang meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan informan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo, UPTD Layanan Disabilitas, pihak sekolah, Guru Pendamping Khusus (GPK), wali murid, dan peserta didik penyandang disabilitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi sekolah inklusif telah berjalan cukup baik melalui komunikasi dan koordinasi yang efektif, dukungan sumber daya, komitmen sekolah, serta adanya SOP dan pembagian tugas yang jelas. Faktor pendukung meliputi dukungan pemerintah daerah, UPTD Layanan Disabilitas, keberadaan GPK, dan kerja sama antar pihak. Sementara itu, faktor penghambat meliputi keterbatasan sarana dan prasarana, jumlah GPK yang terbatas, keberagaman kebutuhan peserta didik disabilitas, dan masih ditemukannya perilaku perundungan (bullying).

Kata Kunci: *Implementasi Kebijakan, Pendidikan Inklusif, Hak Pendidikan, Siswa Penyandang Disabilitas, Kabupaten Layak Anak.*

A. PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan investasi strategis dalam pembangunan bangsa karena berperan penting dalam menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Namun, pemerataan pendidikan di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait kesenjangan akses dan mutu pendidikan antara wilayah perkotaan dan perdesaan. Keterbatasan tenaga pendidik, sarana dan prasarana sekolah, serta akses menuju satuan pendidikan menjadi faktor yang memengaruhi kualitas layanan pendidikan di berbagai daerah. Selain itu, keberagaman budaya dan sosial masyarakat Indonesia menuntut sistem pendidikan yang mampu mengakomodasi perbedaan tersebut melalui kurikulum yang inklusif dan menghargai nilai-nilai lokal (Noviani, 2023)

Peningkatan kualitas pendidikan tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan fasilitas, tetapi juga oleh kompetensi tenaga pendidik. Meskipun sekolah negeri sering menghadapi keterbatasan sumber daya, dedikasi guru tetap menjadi faktor penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang efektif dan inspiratif (Efendi & Sholeh, 2023 dalam (Islami, 2024)). Oleh karena itu, penguatan kompetensi guru melalui pelatihan berkelanjutan menjadi kebutuhan penting karena mampu meningkatkan kualitas pembelajaran, memperluas kemampuan pedagogis, dan

membantu pendidik beradaptasi dengan perkembangan kebutuhan peserta didik (Islami, 2024).

Salah satu bentuk pemerataan pendidikan adalah penyelenggaraan pendidikan inklusif yang memberikan kesempatan kepada seluruh peserta didik, termasuk penyandang disabilitas, untuk memperoleh layanan pendidikan tanpa diskriminasi. Pendidikan inklusif merupakan implementasi prinsip hak asasi manusia dalam bidang pendidikan. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan guru pendamping khusus, sarana dan prasarana yang belum memadai, serta rendahnya kepercayaan sebagian orang tua terhadap sekolah inklusif. Padahal, penelitian menunjukkan bahwa peserta didik berkebutuhan khusus yang belajar dalam lingkungan inklusif memiliki perkembangan sosial dan emosional yang lebih baik (Rahman et al., 2023). Selain itu, lingkungan pendidikan inklusif mampu meningkatkan sikap toleransi, empati, dan penghargaan terhadap keberagaman bagi seluruh peserta didik (Amahoru & Ahyani, 2023).

Komitmen terhadap pemenuhan hak pendidikan anak di Kabupaten Sidoarjo diwujudkan melalui Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak. Peraturan tersebut menegaskan pentingnya penyediaan layanan pendidikan yang aman, ramah anak, dan inklusif bagi seluruh peserta didik, termasuk anak penyandang disabilitas. Salah satu implementasinya dilakukan melalui pengembangan sekolah negeri menjadi Sekolah Ramah Anak dan sekolah penyelenggara pendidikan inklusif. Kebijakan ini sejalan dengan upaya pemenuhan hak pendidikan anak tanpa diskriminasi serta mendukung terciptanya lingkungan belajar yang mendukung tumbuh kembang anak secara optimal.

Berdasarkan data Verval Peserta Didik Berkebutuhan Khusus (PDBK) Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah tahun 2026, terdapat 161 peserta didik berkebutuhan khusus pada jenjang SMP Negeri di Kabupaten Sidoarjo. Data tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan terhadap layanan pendidikan inklusif masih cukup tinggi sehingga diperlukan kebijakan dan praktik pendidikan yang mampu mengakomodasi kebutuhan belajar peserta didik secara setara. Salah satu sekolah penyelenggara pendidikan inklusif di Kabupaten Sidoarjo adalah SMP Negeri 2 Taman. Sekolah ini telah menerapkan pendidikan inklusif melalui integrasi kebijakan sekolah, proses pembelajaran, kegiatan kesiswaan, dan ekstrakurikuler yang mendukung partisipasi seluruh peserta didik.

Tabel 1.1 Data Peserta Didik Berkebutuhan Khusus pada Jenjang SMP Negeri di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2026

NO.	Uraian	Jumlah
1.	Jumlah Peserta Didik (PD)	29.057
	Peserta Didik Valid	28.719
3.	Peserta Didik Berkebutuhan Khusus (PDBK) Valid	161
4.	PDBK Ketunaan Tunggal	152
5.	Ketunaan Tunggal Memenuhi Klasifikasi	53
6.	Ketunaan Tunggal Tidak Memenuhi Klasifikasi	99
7.	PDBK Ketunaan Ganda	9
8.	Ketunaan Ganda Memenuhi Klasifikasi	0
9.	Ketunaan Ganda Tidak Memenuhi Klasifikasi	9

Sumber: Website kemendikdasmen (2026), data diolah kembali oleh peneliti (2026).

Meskipun demikian, implementasi pendidikan inklusif masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan tenaga profesional, proses identifikasi peserta didik berkebutuhan khusus yang belum optimal, serta kebutuhan adaptasi kurikulum sesuai karakteristik peserta didik (Waritsman & Djanapa Bulow, 2022). Adaptasi kurikulum menjadi aspek penting dalam pendidikan inklusif karena memungkinkan setiap peserta didik memperoleh pengalaman belajar yang sesuai dengan kebutuhannya tanpa mengurangi kualitas pendidikan yang diterima (Izzatun Ni'mah et al., 2024). Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi penyelenggaraan sekolah inklusif dalam pemenuhan hak pendidikan siswa disabilitas di SMP Negeri 2 Taman Kabupaten Sidoarjo, khususnya terkait aspek kebijakan, pelaksanaan, dan dampaknya terhadap pemenuhan hak pendidikan yang inklusif dan ramah anak. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi penyelenggaraan sekolah inklusif dalam pemenuhan hak pendidikan siswa disabilitas di SMP Negeri 2 Taman Kabupaten Sidoarjo dengan menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edward III yang meliputi aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menganalisis implementasi penyelenggaraan sekolah inklusif dalam pemenuhan hak pendidikan siswa disabilitas di SMP Negeri 2 Taman Kabupaten Sidoarjo. Lokasi penelitian dipilih karena sekolah tersebut merupakan salah satu penyelenggara pendidikan inklusif dan Sekolah Ramah Anak di Kabupaten Sidoarjo. Informan penelitian ditentukan menggunakan teknik purposive sampling yang meliputi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo, UPTD Layanan Disabilitas Kabupaten Sidoarjo, wakil kepala sekolah bidang kurikulum, Guru Pendamping Khusus (GPK), orang tua siswa disabilitas, dan peserta didik

penyandang disabilitas. Data penelitian terdiri atas data primer yang diperoleh melalui wawancara mendalam dan observasi serta data sekunder yang berasal dari dokumen sekolah, peraturan perundang-undangan, jurnal, dan literatur yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, sedangkan analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Miles et al., 2014). Analisis penelitian berpedoman pada teori implementasi kebijakan George C. Edward III yang mencakup aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi dalam penyelenggaraan sekolah inklusif (Edward III, 1980).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Komunikasi

Komunikasi merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan karena menentukan keberhasilan penyampaian informasi dan koordinasi antar pihak yang terlibat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi dalam penyelenggaraan sekolah inklusif di SMP Negeri 2 Taman telah berjalan dengan baik. Penyampaian informasi dilakukan melalui koordinasi antara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo, UPTD Layanan Disabilitas Kabupaten Sidoarjo, pihak sekolah, Guru Pendamping Khusus (GPK), serta orang tua peserta didik penyandang disabilitas. Komunikasi tersebut dilakukan melalui kegiatan sosialisasi, pelatihan, monitoring, konsultasi, dan pendampingan yang dilaksanakan secara berkelanjutan. Selain itu, komunikasi antara sekolah dan orang tua juga berjalan cukup efektif. Orang tua memperoleh informasi terkait perkembangan peserta didik maupun layanan pendidikan yang diberikan sekolah. Kondisi ini menunjukkan bahwa proses penyampaian informasi telah berlangsung secara jelas dan konsisten sehingga mendukung pelaksanaan sekolah inklusif. Temuan ini sejalan dengan teori George C. Edward III yang menegaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh komunikasi yang jelas, tepat, dan berkelanjutan.

2. Sumber Daya

Aspek sumber daya dalam penelitian ini meliputi sumber daya manusia serta sarana dan prasarana pendukung pendidikan inklusif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SMP Negeri 2 Taman telah memiliki Guru Pendamping Khusus (GPK) yang berperan dalam mengidentifikasi kebutuhan peserta didik penyandang disabilitas, memberikan pendampingan belajar, serta membantu guru mata pelajaran dalam menyesuaikan pembelajaran sesuai kebutuhan siswa. Selain keberadaan GPK, sekolah juga memperoleh dukungan berupa pelatihan guru, layanan asesmen gratis, serta pendampingan dari UPTD Layanan Disabilitas Kabupaten Sidoarjo. Namun demikian, masih terdapat beberapa keterbatasan sumber daya, terutama jumlah GPK yang hanya satu orang dan sarana pendukung yang belum sepenuhnya memadai. Keterbatasan tersebut menjadi tantangan dalam memberikan layanan yang optimal kepada seluruh peserta didik penyandang disabilitas. Berdasarkan teori George C. Edward III, sumber daya merupakan unsur penting yang menentukan efektivitas implementasi kebijakan. Oleh karena itu, ketersediaan tenaga pendidik dan fasilitas pendukung perlu terus ditingkatkan.

3. Disposisi

Disposisi berkaitan dengan sikap, komitmen, dan kesediaan pelaksana kebijakan dalam menjalankan tugasnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, serta Guru Pendamping Khusus memiliki komitmen yang baik dalam mendukung pelaksanaan sekolah inklusif. Komitmen tersebut ditunjukkan melalui upaya memberikan pelayanan pendidikan tanpa diskriminasi, menyesuaikan proses pembelajaran sesuai kebutuhan peserta didik, serta memberikan pendampingan kepada siswa penyandang disabilitas. Pihak sekolah juga secara aktif mengikuti pelatihan dan bekerja sama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan inklusif. Sikap positif para pelaksana kebijakan menjadi salah satu faktor yang mendukung keberhasilan penyelenggaraan sekolah inklusif. Temuan ini sesuai dengan teori George C. Edward III yang menyatakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh kemauan dan komitmen pelaksana dalam menjalankan kebijakan yang telah ditetapkan.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi dalam implementasi sekolah inklusif di SMP Negeri 2 Taman ditunjukkan melalui adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) serta pembagian tugas dan wewenang yang jelas antar pihak. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo berperan dalam penetapan kebijakan, koordinasi, monitoring, dan evaluasi. UPTD Layanan Disabilitas bertugas memberikan asesmen, konsultasi, serta pendampingan kepada sekolah. Di tingkat sekolah, kepala sekolah bertanggung jawab dalam pengelolaan program inklusif, guru mata pelajaran menyesuaikan proses pembelajaran, sedangkan GPK melakukan pendampingan dan identifikasi kebutuhan peserta didik penyandang disabilitas. Kejelasan pembagian tugas tersebut menunjukkan bahwa struktur birokrasi telah mendukung pelaksanaan pendidikan inklusif secara terkoordinasi. Kondisi ini sesuai dengan teori George C. Edward III yang menekankan pentingnya SOP dan pembagian tugas yang jelas dalam mendukung keberhasilan implementasi kebijakan.

D. PENUTUP

Kesimpulan

Mengacu pada data dan temuan yang terungkap dalam penelitian, implementasi penyelenggaraan sekolah inklusif dalam pemenuhan hak pendidikan siswa disabilitas di SMP Negeri 2 Taman Kabupaten Sidoarjo telah terlaksana secara relatif optimal. Apabila ditelaah berdasarkan teori implementasi kebijakan George C. Edward III, dimensi komunikasi terlaksana melalui penyampaian informasi dan koordinasi yang baik antara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo, UPTD Layanan Disabilitas, pihak sekolah, guru, dan orang tua. Aspek sumber daya didukung oleh keberadaan Guru Pendamping Khusus (GPK), pelatihan guru, layanan asesmen, serta sarana pendukung pembelajaran. Aspek disposisi terlihat dari komitmen otoritas sekolah, tenaga pendidik, serta tenaga kependidikan dalam memberikan layanan pendidikan yang setara bagi peserta didik penyandang disabilitas. Sementara itu, aspek struktur birokrasi ditunjukkan melalui adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) serta pembagian

tugas dan wewenang yang jelas dalam pelaksanaan pendidikan inklusif. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemenuhan hak pendidikan bagi siswa disabilitas di SMP Negeri 2 Taman telah dilaksanakan sesuai dengan tujuan penyelenggaraan sekolah inklusif.

Adapun faktor pendukung implementasi sekolah inklusif meliputi dukungan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo serta UPTD Layanan Disabilitas melalui pelatihan, koordinasi, dan layanan asesmen, keberadaan Guru Pendamping Khusus (GPK), adanya Standar Operasional Prosedur (SOP), komitmen pihak sekolah, serta kerja sama antara sekolah, orang tua, dan pihak terkait. Sementara itu, faktor penghambat yang masih dihadapi meliputi keterbatasan sarana dan prasarana, terbatasnya jumlah Guru Pendamping Khusus (GPK), perbedaan kebutuhan dan kemampuan peserta didik penyandang disabilitas, serta masih ditemukannya perilaku perundungan dari sebagian peserta didik reguler. Meskipun demikian, berbagai upaya yang dilakukan oleh seluruh pihak yang terlibat mampu mendukung keberlangsungan pendidikan inklusif sehingga hak pendidikan siswa disabilitas tetap dapat terpenuhi dengan cukup baik di SMP Negeri 2 Taman Kabupaten Sidoarjo.

Saran

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo, diharapkan untuk dapat meningkatkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara merata pada seluruh sekolah penyelenggara pendidikan inklusif. Selain itu, perlu adanya perhatian terhadap pemenuhan sumber daya pendukung, khususnya ketersediaan Guru Pendamping Khusus (GPK) dan sarana prasarana yang ramah disabilitas guna mendukung optimalisasi layanan pendidikan inklusif.
2. UPTD Layanan Disabilitas Kabupaten Sidoarjo, diharapkan dapat mempertahankan dan mengoptimalkan pelaksanaan pelatihan, pendampingan, konsultasi, serta layanan asesmen bagi peserta didik penyandang disabilitas yang selama ini telah berjalan dengan baik. Selain itu, perlu adanya penguatan tindak lanjut hasil pelatihan agar guru yang terlibat secara langsung dalam pembelajaran peserta didik penyandang disabilitas dapat menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh secara lebih optimal dalam proses pembelajaran.
3. SMP Negeri 2 Taman Kabupaten Sidoarjo, diharapkan dapat terus mengakselerasi mutu layanan pendidikan yang berorientasi pada inklusivitas yang telah dilaksanakan, terutama dalam menyesuaikan kebutuhan belajar peserta didik penyandang disabilitas. Selain itu, sekolah perlu memperkuat upaya dalam mengonstruksikan lingkungan pembelajaran yang aman, akomodatif, dan inklusif bagi keseluruhan peserta didik, melalui kegiatan yang mendorong interaksi positif, sikap saling menghargai, serta penghormatan terhadap keberagaman. Upaya pencegahan dan penanganan perundungan (bullying) juga perlu terus ditingkatkan melalui pengawasan, pembinaan, dan pemberian tindakan yang sesuai terhadap peserta didik yang melakukan perundungan. Dengan demikian, seluruh siswa didik, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan disabilitas, dapat memperoleh kesempatan yang setara untuk belajar, berinteraksi, berpartisipasi, dan mengembangkan potensi dirinya secara optimal di lingkungan sekolah.

DAFTAR PUSTAKA

- Amahoru, A., & Ahyani, E. (2023). Psikologi Pendidikan Inklusif: Menciptakan Lingkungan Belajar yang Ramah Bagi Semua Siswa. *Indo-MathEdu Intellectuals Journal*, 4(3), 2368–2377. <https://doi.org/10.54373/imeij.v4i3.522>
- Islami, M. F. (2024). *Perbandingan Kualitas Pendidikan Antara Sekolah Negeri Dan Sekolah Swasta : Eksplorasi Pada Aspek Pembelajaran*.
- Izzatun Ni'mah, U. N., Elhady, A., & Mustofa, T. A. (2024). Strategi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam untuk Siswa Inklusi di Sekolah Menengah Pertama Kelas Delapan. *Aulad: Journal on Early Childhood*, 7(1), 104–114. <https://doi.org/10.31004/aulad.v7i1.589>
- Rahman, R., Sirajuddin, S., Zulkarnain, Z., & Suradi, S. (2023). Prinsip, Implementasi dan Kompetensi Guru dalam Pendidikan Inklusi. *Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal*, 9(2), 1075–1082.
- Waritsman, A., & Djanapa Bulow, I. (2022). Learning Innovations in Training Activities: A Systematic Literature Review Inovasi Pembelajaran pada Kegiatan Pelatihan: Sebuah Kajian Literatur Sistematis. *Jurnal 12 Waiheru*, 8(2), 134–141.